PERANAN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM) DALAM MENANGANI PERMASALAHAN REFUGEES (PENGUNGSI) ROHINGYA DI INDONESIA

E.N.DOMLOBOY NST

Fakultas Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Potensi Utama Medan

domloboynasution@gmail.com

ABSTRACT

The research has a purpose to know and explain about the function from International Organization For Migration (IOM) for solve the problems of Refugees Rohingya in Indonesia. The research used descriptive-analytic methods. Techniques for collected Data are books, journals, and online resources. The results of this research show that IOM maintains active role for rightful authority Rohingya in Indonesia. IOM has a consistency to fight for give Rohingya's rightful authority. IOM already give food, clothing, home (the place for stay), health, and education for Rohingya in Indonesia. Work together with other Organization International, Refugees of Rohingya was reduce from 1791 in May 2015, become 959 Refugees in September 2016. IOM has an obstacle for give Rohingya's rightful authority, because unresponsibile someone who have a duty to help Rohingya. Because of that, the function of this research is to see, correction and for evaluation International Organization For Migration (IOM).

Keywords: *International Organization For Migration (IOM), Refugees, Rohingya, Indonesia*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan peranan International Organization For Migration (IOM) dalam menangani permasalahan Refugees (pengungsi) Rohingya di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif-analitik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka buku, jurnal dan sumber online. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa IOM berperan sangat aktif dalam mengupayakan hak-hak pengungsi Rohingya di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari konsistensi IOM dalam merencanakan rencana kerja untuk memberikan hak kepada para pengungsi Rohingya. IOM telah memberikan hak sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan bagi para pengungsi Rohingya di Indonesia. Bersama dengan Organisasi Internasional lain, pengungsi Rohingya telah berkurang dari 1791 pengungsi pada Mei 2015, menjadi 959 pengungsi pada September 2016. Adapun hambatan yang dihadapi IOM adalah belum maksimal tercapai hak bagi para pengungsi disebabkan kurangnya tanggung jawab beberapa orang yang diberikan mandat dari IOM. Oleh karena itulah penelitian ini berfungsi untuk mengevaluasi dan mengoreksi sejauh mana keberhasilan dari berjalannya Organisasi Internasional dalam hal ini adalah IOM.

Kata Kunci : *International Organization For Migration (IOM), Refugees, Rohingya, Indonesia.*

I. PENDAHULUAN

Ilmu Hubungan Internasional merupakan ilmu yang berhubungan dengan berbagai macam isu dan berfokus pada bidang ekonomi, politik, sosial dan keamanan, hingga isu kontemporer yaitu isu lingkungan, gender dan migrasi (Chris *et al*, 2005). Dalam hubungan internasional, salah satu isu yang paling serius diperbincangkan adalah isu terkait kemanusiaan, terutama masalah pengungsi (*refugee*) dari negara-negara konflik kelompok minoritas yang saat ini jumlah dan penyebarannya begitu banyak ke berbagai negara-negara di dunia (Rizka, 2016). Pengertian pengungsi atau *Refugee* merupakan seorang yang tidak bisa/susah dan kemungkinan tidak akan kembali ke negara asalnya disebabkan oleh ketakutan akan situasi yang mengancam keselamatan hidup dalam masalah-masalah seperti ras, agama, kewarganegaraan, keanggotaan dalam kelompok sosial, ataupun masalah politik (UNHCR, 2010).

Pada saat sekarang ini, para pengungsi sebagian besar datang dari wilayah Afrika, Timur Tengah, dan Asia Selatan dimana konflik-konflik panjang sering terjadi di wilayah tersebut. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa salah satu kelompok minoritas yang paling terpojokkan di dunia yaitu orang-orang Rohingya. Persekusi yang mereka alami di Myanmar telah mendorong pengungsian besar-besaran ke berbagai negara. Mereka terpaksa menempuh perjalanan panjang dan pahit, hingga tak sedikit menjadi korban perdagangan manusia. Indonesia termasuk salah satu negara yang terkena dampak pengungsian orang-orang Rohingya. Paling tidak ada tiga kali gelombang kedatangan orang-orang Rohingya di wilayah Indonesia, yakni pada 2009, 2012, dan 2015. Provinsi Aceh dan Kota Medan kerap menjadi lokasi awal kedatangan para pengungsi Rohingya, untuk kemudian mereka direlokasi ke berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Makassar dan Jabodetabek (Rizka, 2016). Data yang diperoleh menurut Rizka (2016), pengungsi Rohingya di Indonesia per September 2016 sebanyak 959 orang. Jumlah ini berkurang banyak dari total populasi Pengungsi Rohingya pada Mei 2015 yang mencapai 1791 orang. Para pengungsi Rohingya di wilayah Aceh ditempatkan di *camp* pengungsian. Sementara di Makassar dan di Medan, para pengungsi Rohingya ditempatkan di dalam *community house* atau *shelter* dan rumah detensi imigrasi. Sedangkan di wilayah Jabodetabek, para pengungsi Rohingya tersebar dengan mengupayakan tempat penampungannya secara mandiri.

kebijakan penanganan pengungsi Rohingya didasari pada diskresi pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pelibatan

elemen masyarakat sipil dalam penanganan pengungsi Rohingya hanya terlihat signifikan di wilayah Aceh, berbeda dengan wilayah Medan, Makassar. Sejak kedatangan awal para pengungsi Rohingya, masyarakat sekitar yang umumnya berprofesi sebagai nelayan di Aceh telah menunjukkan kepeduliannya terhadap para pengungsi dari berbagai kegiatan ekonomi, baik membantu menjaga toko atau rumah makan, bertani, maupun mencari ikan (Rizka, 2016).

Adapun peran globalisasi dalam hubungan internasional memunculkan pola baru dimana negara tidak lagi sebagai aktor utama namun juga ditandai dengan semakin menguatnya peran aktor non-negara dan berbagai macam organisasi internasional lainnya dalam menangani setiap permasalahan yang ada (Winarno, 2014). Dalam hal para pengungsi Rohingya, hak-hak mereka diletakan pada organisasi internasional seperti UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) dan IOM (*International Organization for Migration*). UNHCR secara khusus bertanggungjawab untuk melakukan penentuan status pengungsi dan mengupayakan penempatan ke negara ketiga (*resettlement*), sementara berbagai hak hidup para pengungsi di tempat pengungsian seperti urusan terkait pangan, pakaian, tempat penampungan, tunjangan kesehatan, dan pendidikan, dipenuhi oleh IOM (Rizka, 2016).

IOM pertama kali hadir di Indonesia pada tahun 1979, dan pada tahun 1991 Pemerintah Indonesia mendapat status sebagai Pengamat di IOM. Pada tahun 2000, IOM dan Pemerintah Negara Indonesia menandatangani perjanjian kerjasama dalam memerangi penyelundupan manusia di Indonesia. Data yang diperoleh dari IOM in Indonesia (2014) mengenai bantuan dan kerjasama teknis IOM pada tahun 2013 dilakukan berdasarkan hal-hal berikut :

1. Pengidentifikasian jenis bantuan teknis yang dibutuhkan oleh Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan penanganan migrasi
2. Memberikan pelatihan yang komprehensif, yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan yang diperlukan dalam memerangi penyelundupan manusia dan hak-hak para pengungsi
3. Memfasilitasi upaya kerjasama regional dalam memerangi penyelundupan manusia, antar Negara-negara asal, transit dan tujuan.

Indonesia telah memiliki kebijakan-kebijakan dalam penanganan imigran yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Ada pula kebijakan selektif

(*selective policy*) yang diterapkan di mana kebijakan ini menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, diatur masuknya orang asing yang memperoleh izin tinggal ke dalam wilayah Indonesia, demikian pula bagi orang asing yang memperoleh izin tinggal di wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia menerapkan Kebijakan Selektif (*selective policy*). Esensi dari kebijakan ini merupakan landasan utama dari setiap peraturan keimigrasian bagi Orang Asing, yaitu hanya Orang Asing yang bermanfaat dan tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia. Namun terkadang permasalahan semakin berkembang sehingga membuat para migran tidak punya pilihan lain selain mencoba masuk ke suatu negara dengan cara ilegal. Selain itu, terkait hak atas kesehatan dan pendidikan, serta dukungan tinggal dari pihak-pihak terkait kerap kurang memenuhi kebutuhan para pengungsi (Rizka, 2016). Untuk itulah, peran IOM sebagai suatu organisasi internasional sangat diperlukan dalam rangka menjalin kerjasama dengan negara-negara tujuan migran sekaligus memastikan hak-hak para migran tersebut tetap dapat terpenuhi dengan baik.

Penelitian relevan yang sebelumnya pernah dilakukan oleh Ni Made Maha Putri Paramitha (2016) adalah mengenai “Peranan UNHCR Terhadap Perlindungan Pengungsi Rohingya di Aceh Indonesia”, Ni Made menyimpulkan bahwa UNHCR sudah melakukan peranannya terhadap para imigran Rohingya di Aceh pada tahun 2015, diantaranya turun langsung ke lapangan dalam pengadaan sosialisasi, pada saat mendata pengungsi, dan memberikan perlindungan terhadap para pengungsi. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Liserida F. Manik (2012) mengenai “Peranan UNHCR Menangani Imigran Ilegal Myanmar di Indonesia 2008-2011”, kesimpulannya adalah UNHCR menjadi fasilitator setiap pencari suaka yang berasal dari Myanmar di Indonesia. UNHCR juga memiliki tugas untuk mendata dan memberikan status pengungsi kepada setiap pencari suaka dan memberikan solusi permanen kepada setiap pengungsi untuk memperoleh hak mereka sebagai warga negara di negara ketiga. Selain itu UNHCR juga menjalin kerjasama dengan pemerintah Indonesia dan IOM untuk memfasilitasi para pengungsi baik berupa bantuan makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

II. PEMBAHASAN

Metode Penelitian ini yang digunakan adalah metode deskriptif-analitik, dengan teknik pengumpulan data yaitu melalui studi pustaka, studi ilmiah, buku dan jurnal Internasional maupun Nasional.

Refugees (Pengungsi)

Pengungsi adalah seseorang yang memiliki rasa takut yang beralasan karena ras, agama, kebangsaan dan keanggotaan yang dimiliki mereka dalam suatu kelompok sosial di Negara sendiri yang tidak dapat ataupun enggan memanfaatkan perlindungan di Negara asalnya karena takut terhadap persekusi (Jastram, *et al* 2004). Bagi Negara-negara Barat, pengungsi yang baik adalah pengungsi yang melarikan diri dari komunisme dan bermukim di Negara Barat. Definisi sempit menurut Matthew Lister sebagai: *“The definition covers only those who have a well-founded fear of persecution on the basis of one of the so-called protected grounds”*. Dijelaskan bahwa mereka yang tidak mengalami ketakutan atas persekusi walaupun mengalami berbagai macam penderitaan seperti bencana alam dan kelaparan yang sangat membahayakan nyawa yang bahkan tidak bisa disebut sebagai pengungsi. Adapula pendapat Shocknove yang patut digarispawahi yaitu tidak patut bagi mereka menarik para pengungsi ke daerah/ wilayah Negara yang miskin karena hal itu kurang tepat. Sulit membedakan antara pengungsi yang menginginkan/ mengungsi untuk mendapat kehidupan layak atau pengungsi akibat persekusi (Fitria, 2015).

Kebijakan Indonesia

Letak Indonesia menjadikan Indonesia sebagai penghubung antara benua Asia dan benua Australia Indonesia yang merupakan negara kepulauan tentu memiliki banyak celah yang dapat dimanfaatkan oleh para imigran gelap yang tidak serta merta mempunyai tujuan yang sama, terkadang ada yang menjadikan Indonesia sebagai tempat transit biasa, namun tidak jarang imigran gelap yang memang ingin tinggal guna mendapatkan penghidupan yang lebih layak daripada di negara asalnya (Kemenkumham, 2016). Indonesia telah memiliki kebijakan-kebijakandalam penanganan imigran yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Rizka, 2016).

Indonesia juga merupakan negara yang belum pernah meratifikasi Konvensi PBB Tahun 1951 terkait Pengungsi dengan alasan Indonesia belum mampu menyejahterakan seluruh warga negara Indonesia sendiri sehingga butuh pertimbangan yang matang untuk menjadi negara pihak dalam konvensi terkait pengungsi tersebut. Meskipun demikian, Indonesia tetap menerapkan prinsip-prinsip yang telah diatur dan tetap menjaga stabilitas keamanan manusia sebagaimana yang tercantum pada Pasal 3 Ayat 1-3 dalam UU Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 yang berbunyi: (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan. (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi. Pemerintah Republik Indonesia menerapkan Kebijakan Selektif (*selective policy*) (Rizka, 2016).

Peranan *International Organization for Migration* (IOM) Pada Pengungsi Rohingya di Indonesia

IOM pertama kali hadir di Indonesia pada tahun 1979, dan pada tahun 1991 Pemerintah Indonesia mendapat status sebagai Pengamat di IOM. Keberadaan IOM sebagai suatu organisasi internasional muncul dikarenakan perkembangan isu-isu migrasi yang semakin meluas dimana tidak lagi hanya menangani persoalan pengungsi dan pencari suaka saja namun juga mengarah kepada permasalahan migrasi ilegal serta migran yang hak-haknya perlu dilindungi. Pada tahun 2000, IOM dan Pemerintah Negara Indonesia menandatangani perjanjian kerjasama dalam memerangi penyelundupan manusia di Indonesia. IOM bertugas untuk menjamin adanya pengaturan migrasi yang teratur dan manusiawi, mempromosikan kerjasama internasional terkait isu migrasi, mencari solusi praktis atas permasalahan dan memberikan bantuan humaniter kepada migran yang membutuhkan, baik itu pengungsi, pencari suaka serta orang-orang terlantar (*displaced people*), dan juga menyediakan layanan bantuan serta saran bagi migran maupun pemerintah, dan dalam hal menangani permasalahan yang berpusat pada isu-isu migrasi, IOM juga bekerjasama dengan pemerintah dan lembaga masyarakat sipil setempat (LSM) untuk memberi pemahaman lebih lanjut tentang isu migrasi, mengupayakan perkembangan

ekonomi dan sosial melalui migrasi serta menjamin hak-hak asasi para migran (Natalie *et al*, 2015).

Ada tiga aspek kebutuhan dasar manusia yang menjadi pokok dalam menjalankan kehidupannya, yaitu; sandang atau pakaian, pangan atau makanan, dan papan atau tempat tinggal. Pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan IOM melalui Persetujuan Kerjasama dalam Penanganan Migrasi Iregular, Pengungsi Internal, Manajemen Perbatasan dan Imigrasi yang ditandatangani pada tahun 2000 untuk menyokong kebutuhan hidup dasar para pengungsi. Persetujuan ini menjadi basis hukum beroperasinya IOM di Indonesia. Dalam tiap-tiap kerjasama dengan instansi pemerintah pun, IOM selalu melakukan penandatanganan MoU bersama instansi pemerintah baik lokal maupun nasional yang terkait. Mengenai masalah Rohingya, IOM turut ikut serta menjadi partner Departemen Luar Negeri (Deplu) untuk melakukan investigasi awal, pendataan dan wawancara.

Pemerintah Indonesia dibantu oleh IOM dalam hal menangani pengungsi dengan cara: pertama, IOM yang menemukan para pengungsi menjelaskan tentang keadaan mereka dan membantu dalam hal mengarahkan pilihan, termasuk adanya suatu permohonan untuk menjadikan mereka yang ingin menjadi pengungsi di Indonesia yang selebihnya akan ditangani oleh UNHCR. Namun apabila ada diantara para pengungsi yang ingin dipulangkan ke Negara asalnya, maka IOM akan mengurus segalanya termasuk tiket dan semua dokumen yang diperlukan. kedua, para pengungsi yang ada dan ditemukan oleh pihak yang berwenang diberitahukan kepada IOM, lalu dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh suatu tim, kemudian dicarikan tempat tinggal dan makanan/ sebagian diberikan tunjangan. Berikut adalah daftar tunjangan yang diberikan IOM oleh pengungsi Rohingya di Indonesia.

Tabel 1.
Jumlah Tunjangan IOM Kepada Pengungsi Rohingya di Jakarta, Makassar dan Medan

Kategori	Tunjangan (/bulan)
Dewasa	Rp 1.250.000,- /bulan
Anak-anak < 18 th	Rp 500.000,- /bulan

Sumber : SUAKA Laporan Penelitian Nasib Pengungsi Rohingya di Indonesia (2016)

Tunjangan ini hanya diberikan kepada pengungsi Rohingya yang berada di Jakarta, Makassar dan Medan dikarenakan jumlah uang tersebut diberikan untuk memenuhi kebutuhan makanan, transportasi ke Puskesmas atau Rumah Sakit dan kebutuhan lainnya yang tidak penuhi secara langsung oleh IOM. Tunjangan ini diberikan apabila pengungsi

yang bersangkutan tidak disediakan makan sehari-hari. Berbeda dengan pengungsi Rohingya yang berada di Aceh. Seluruh pengungsi Rohingya di Aceh, ditempatkan di camp karena Aceh tidak memiliki fasilitas Rumah Detensi Imigrasi. Penempatan di camp berakibat pada tidak diberikannya tunjangan bulanan tersebut. Hal ini karena seluruh kebutuhan dasar disediakan di dalam camp seperti: makanan dari dapur umum yang rutin diproduksi, klinik kesehatan berserta fasilitas ambulans ataupun dokter kunjungan (camp lainnya), air bersih, toilet umum serta bilik untuk ditinggali (Rizka, 2016). Tetapi, untuk memenuhi kebutuhan lainnya, IOM bekerja sama dengan camp manager memberikan paket bantuan kepada para pengungsi yang berisikan dua mangkok mi instan, roti, makanan kecil, perlengkapan mandi dan serta paket khusus untuk kebutuhan khusus ibu hamil serta anak-anak. Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian oleh Rizka (2016) yang mewawancarai pengungsi Rohingya di berbagai camp serta wawancara dengan IOM bahwasanya paket ini diberikan seminggu sekali ke setiap camp di Aceh. Namun kebanyakan dari pengungsi tidak menggunakan paket tersebut. Oleh karena itu, isi paket yang tidak digunakan dijual oleh penerima bantuan untuk memperoleh uang tambahan dalam rangka memenuhi kebutuhan yang tidak dipenuhi oleh IOM.

Pemerintah Indonesia di bidang Kesehatan menurut penelitian yang dilakukan Rizka (2016) menjamin perawatan pengungsi di rumah-rumah sakit yang bekerjasama dengan IOM. Jaminan ini diberikan di luar dari tunjangan bulanan yang tidak seberapa yang diberikan oleh IOM kepada para pengungsi tiap bulannya. Meski demikian, pengungsi tetap harus membayar sendiri biaya perjalanannya untuk mengakses pengobatan. Apabila di rawat di Rumah Sakit, seluruh biaya yang timbul akan ditanggung oleh IOM. Tetapi jika para pengungsi ingin mendapatkan pengobatan dari Puskesmas ataupun penyedia layanan medis lainnya yang tidak bekerjasama dengan IOM, maka pengungsi tersebut harus membayarkan sendiri biaya yang muncul. Kasus yang timbul di Makassar, biasanya di tiap-tiap shelter ada dokter yang datang seminggu sekali untuk membuka konsultasi dokter. Namun enam bulan belakangan kebijakan tersebut berganti dengan menyediakan box permintaan kedatangan dokter. Jika sakit, penghuni bisa menaruh permintaan tersebut dalam box yang disediakan, dan petugas IOM akan memungut permohonan tersebut seminggu sekali dan memproses permintaan tersebut. Namun pada kenyataannya, meskipun diminta, dokter jarang untuk memenuhi permintaan. Sementara itu, seluruh pelayanan kesehatan para pengungsi di camp Blang Adoe, Aceh, disediakan oleh Puskesmas Kecamatan Suka Makmur yang bekerja sama dengan IOM. Apabila pengungsi mengalami sakit ringan, mereka lebih memilih Puskesmas terdekat

meskipun harus membayar sendiri. Apabila ada kendala bahasa, biasanya mereka membawa serta kawan sesama Rohingya yang mampu berbahasa Indonesia untuk berkomunikasi dengan staf Puskesmas.

Hak akan pendidikan yang didapatkan pengungsi Rohingya menurut Rizka (2016), Sebagai persiapan menuju ke negara ketiga, IOM bekerjasama dengan lembaga swasta penyedia layanan kursus bahasa Inggris membuka kelas kursus bagi para pengungsi. Akses ini terbuka bagi semua pengungsi yang ada di Indonesia. Ada beberapa upaya dari para pengungsi untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah formal. Beberapa dari upaya ini berhasil dengan pendekatan yang dilakukan orang tua anak pengungsi dan dibantu oleh baik Ketua RT setempat maupun oleh orang Indonesia. Ada pula upaya dari pengungsi Rohingya yang hendak melanjutkan studi di universitas di Makassar, namun gagal karena ketiadaan dokumen yang diperlukan. SUAKA dalam penelitian yang dilakukan oleh Rizka (2016) menemukan, hampir semua pengungsi yang berupaya untuk bersekolah secara formal adalah pengungsi yang masih dalam masa wajar usia pendidikan dasar. Sedangkan Hak untuk pekerjaan bagi pengungsi Rohingya, Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi para pengungsi karena Indonesia belum melakukan ratifikasi Konvensi 1951, dan pengungsi juga dilarang melakukan sesuatu yang menghasilkan upah.

Berbagai upaya telah dilakukan IOM bersama-sama dengan pemerintah daerah setempat untuk memenuhi beberapa atau bahkan hampir seluruh hak-hak para pengungsi Rohingya di Indonesia. IOM telah berhasil melakukan kontribusi bersama organisasi Internasional lain yang dibuktikan dengan berkurangnya pengungsi Rohingya per September 2016 sebanyak 959 orang dan jumlah ini berkurang banyak dari total populasi Pengungsi Rohingya pada Mei 2015 yang mencapai 1791 orang, yang sebelumnya pada tahun 2009 sudah masuk 400 pengungsi Rohingya ke Indonesia dan sekitar 1300 pada awal tahun 2015. Dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 1. Jumlah Pengungsi Rohingya di Indonesia

Sumber : SUAKA Laporan Penelitian Nasib Pengungsi Rohingya di Indonesia (2016)

Adapun Indonesia memiliki kebijakan tersendiri untuk melarang para pengungsi bekerja selama di Indonesia. Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, tidak akan terlepas dari kendala dan hambatan yang akan dilalui oleh pemerintah yang juga bekerjasama dengan organisasi internasional dalam hal ini adalah IOM. Program-program yang telah dijabarkan menggambarkan peran IOM sebagai pelaku dimana organisasi ini dapat bertindak sesuai dengan tujuan rancangan kerjasama yang telah dibentuk. Namun tidak menutup kemungkinan upaya tersebut mendapati hambatan. Ketidapatuhan pada prinsip pembagian beban dan tanggung jawab, personal yang individual ataupun terganggu akan adanya pengungsi di daerah setempat, bisa dijadikan faktor atas ketidapatuhan tanggung jawab yang telah disepakati sebelumnya. Selain itu, pemerintah pusat dan daerah merasa dengan adanya organisasi IOM ini sangat membantu menanggulangi dari adanya para pengungsi. Tanpa disadari masih banyak hambatan lain, diantaranya pertama tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat harus banyak terlibat dalam hal bersosialisasi kepada para pengungsi. Kedua, pemerintah belum mampu sepenuhnya mengontrol para pengungsi untuk berbondong-bondong agar tidak datang ke Indonesia. Ketiga, masih ada hak para pengungsi yang belum terpenuhi seperti halnya hak dalam berumah tangga, jika para pengungsi asing ingin menikah dengan orang berstatus warga negara Indonesia, ataupun mereka menikah dengan sesama pengungsi lainnya, maka status mereka tidak tercatat di suatu Negara, begitu juga dengan anak yang dilahirkan. Dan keempat yaitu tunjangan yang diberikan organisasi kepada para pengungsi dihindarkan masih kurang bahkan terkadang tidak cukup, dikarenakan tunjangan hanya berasal dari IOM dan organisasi yang membantu IOM dalam menangani kasus permasalahan para pengungsi.

III. KESIMPULAN

Sebuah organisasi internasional yang menangani masalah Refugees (pengungsi), tidak akan lepas daripada warga dan daerah yang ditempati oleh para pengungsi itu sendiri. IOM sudah banyak berkontribusi dalam penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia, diantaranya:

1. Pemenuhan hak sandang, pangan, dan papan.
2. Pemberian hak kesehatan dan pendidikan.
3. Kontribusi Organisasi Internasional juga telah dibuktikan dengan berkurangnya pengungsi Rohingya per September 2016 sebanyak 959 orang dan jumlah ini berkurang banyak dari total populasi Pengungsi Rohingya pada Mei 2015 yang mencapai 1791 orang.

Namun di lapangan ada saja hambatan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah dibuat. Hambatan bisa berupa oknum-oknum tertentu yang tidak melaksanakan tanggung jawab yang telah diberikan, selain itu hal-hal yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya seperti hak berumah tangga di daerah pengungsian, belum maksimal terkontrolnya para pengungsi yang masuk ke Indonesia yang dapat saja terjadi sewaktu-waktu, dan belum tercukupinya kebutuhan dari tunjangan yang diberikan IOM kepada para pengungsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Argadianti, Rizka R. (2016). Hidup Yang Terabaikan "SUAKA Laporan Penelitian Nasib Pengungsi Rohingya di Indonesia. Jakarta: LBH
- Winarno. Budi (2014). Dinamika Isu-isu Global Kontemporer. Jakarta : PT Buku Seru
- Jastram, Kate dan Anchiron, M. (2004). Perlindungan Pengungsi, yang diterjemahkan oleh Enny Suprpto dan Rama Slamet. Jakarta: Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-bangsa dan Uni Antar Parlemen. Hlmn 19

Jurnal:

- Fitria. (2015). Perlindungan Hukum bagi Pengungsi di Negara Ketiga: Praktik Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum Universitas Padjajaran Bandung, volume 2 nomor 1. hlmn 108
- Made, Ni Maha Putri . (2016). Peranan UNHCR Terhadap Perlindungan Pengungsi Rohingya di Aceh Indonesia. Jurnal. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Natalie, Claudia & Michael Newson. (2015). Migration Policy Service. IOM & Eurasylum. Vol.5 Number 4

Sumber Online:

- F. Manik, Liserida .(2013). Peranan UNHCR Menangani Imigran Ilegal Myanmar di Indonesia 2008-2011. Diakses melalui [http:// repository.unri.ac.id/3564/jurnalq.pdf](http://repository.unri.ac.id/3564/jurnalq.pdf) pada 25 Juli 2017
- IOM . 2014. Upaya Memerangi Penyelundupan Manusia Pada Tahun 2013. Diakses melalui <https://www.iom.int/files/live/sites/iom/files/Country/docs/IOM-Indonesia-Newsletter-for-January-2014.pdf> pada 25 Juli 2017
- UNHCR. 2010. *Convention and Protocol relating to the Status of Refugees 1951*. Diakses melalui <http://www.unhcr.org/3b66c2aa10.pdf> pada 25 Juli 2017
- Badan Penanganan Sumber Daya Manusia dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Imigrasi Nasional dan Problem Pencari Suaka*. Diakses melalui <http://bpsdm.kemenkumham.go.id/130-imigrasi-nasional-dan-problempencari-suaka> pada 25 Juli 2017